

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dimana sumber daya yang ada mampu menaksir potensi yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Membangun koperasi merupakan suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan dan berulang sejalan dengan adanya pergantian generasi, penambahan jumlah penduduk, dan perkembangan dinamis berbagai aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat. Ini artinya dari waktu ke waktu koperasi perlu dibangun,

dievaluasi, dan dilakukan perbaikan dalam pembinaannya.¹

Salah satu urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan adalah pemberdayaan koperasi yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat di daerah. Sebagai perwujudan dari kepedulian terhadap perkembangan dan pembinaan koperasi, pemerintah terus berupaya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan dapat dengan mudah diterapkan seiring dengan era otonomi yang terus digulirkan. Langkah nyata yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah adalah pengembangan koperasi yang mampu meningkatkan nilai tambah penerapan tenaga kerja, dan kemandirian. Langkah ini memiliki beberapa keunggulan antara lain lebih fokusnya kebijakan yang diambil, lebih terarahnya distribusi informasi, serta tingkat kompetisi dan efisiensi yang tinggi dari pelaku usaha dan antar daerah.

Dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi rakyat melalui koperasi, Kepala daerah diberikan kewenangan yang besar dalam pembangunan dengan pelimpahan urusan pembangunan termasuk koperasi, sehingga kepala daerah juga harus ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan koperasi.²

Pada dasarnya setiap strategi pembangunan ekonomi menekankan perhatiannya kepada pentingnya pencapaian

¹ Pariaman Sinaga, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 141

² Ibid, 144

kemajuan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dan antarwilayah. Pakar koperasi Prof. Hans H. Muenker, menyatakan bahwa ciri khusus koperasi menjadi pola hukum perkoperasian. Ciri khusus koperasi adalah swadaya, ciri swadaya mencerminkan pengelolaan sendiri oleh anggota sehingga setiap anggota berhak ikut serta dalam kepengurusan koperasi, bertanggungjawab sendiri dalam hal kesinambungan keberadaan koperasi dan akibat yang timbul dari kegiatan koperasi.³

Berkembangnya perekonomian masyarakat sekarang ini, tidak terlepas dari banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Keduanya telah banyak mengalami perkembangan, baik dari sisi produk maupun jasa yang ditawarkan kepada masyarakat di berbagai kota atau daerah di Indonesia, termasuk di Kota Kediri, Jawa Timur.

Selain lembaga keuangan konvensional telah banyak lembaga keuangan berbasis syariah. Keberadaan sistem lembaga keuangan syariah melengkapi sistem lembaga keuangan konvensional yang sudah melekat di kalangan masyarakat. Dengan sistem bagi hasil yang ada pada lembaga keuangan syariah mampu merubah masyarakat menerima ide-ide baru yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang

³ Ibid, 172

berbentuk non bank antara lain adalah asuransi syariah, pegadaian syariah dan koperasi syariah. Lembaga koperasi syariah merupakan salah satu dari pranata sosial hukum Islam yang dipraktikkan dan dikembangkan di Indonesia.⁴ Berikut perkembangan data koperasi syariah kota Kediri :⁵

Tabel 1.1

Laporan Perkembangan Kinerja Koperasi Syariah Kota Kediri
Posisi Tahun 2017 – 2019

No.	Nama Lembaga	2019			
		Jumlah Anggota	Modal	Volume Usaha	SHU
1	Kopwansyah P Qutmil Qur'an	40	54.423.800	114.784.200	7.625.000
2.	Kopwansyah P Khataman Qur'an	44	69.319.810	164.719.000	8.810.050
3.	Kopwansyah P Saliman Bujel	26	36.843.000	52.935.000	773.000
4.	Kopwansyah l'anh Umah Campurejo	60	89.957.135	335.725.000	13.619.500
5.	Kopwansyah P Roudhotul Jannah	67	154.706.803	406.365.000	12.817.303
6.	Kopwansyah P Rutinan Fatayat	26	34.155.000	26.890.000	1.420.000
7.	Kopwansyah P Rutin Al-Hidayah	30	64.344.250	110.150.000	2.584.750

⁴ Abdul Gani Isa, dkk, *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam, 2012), 42

⁵ Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (UMTK) Kota Kediri.

8.	Kopwansyah P Al-Hidayah	49	76.382.700	169.610.000	12.821.400
9.	Kopwansyah P Malam Selasa Nur Hidayah	33	40.678.900	122.950.000	1.420.400
10.	Kopwansyah P Yasinan Al Mubarak	48	37.324.000	116.075.000	2.889.000
11.	Lantasir	71	1.319.787.697	624.709.90	744.062.612
12.	Insan Sejahtera	70	41.111.000	82.222.000	5.300.000
13.	Trijaya	54	4.009.116.468	7.922.952.406	125.257.369
14.	Harum Dhaha	431	1.534.569.857	3.069.139.714	16.170.437
15.	Ar Rahmah	530	949.523.530	1.894.947.060	67.858.668
16.	Mitra Mandiri Sejahtera	169	841.512.275	1.683.024.550	5.000
17.	Amanah Mandiri	34	897.390.163	787.817.327	94.635.697
18.	Berkah Abadi	23	156.625.688	309.570.988	6.455.788
19.	Amanah An Nur	222	1.739.050	3.478.112	16.928
20.	Bio Zam Zam	31	155.074.000	310.148.000	15.005.000

No.	Nama Lembaga	2018			
		Jumlah Anggota	Modal	Volume Usaha	SHU
1	Kopwansyah P Qutmil Qur'an	37	41.085.000	41.085.000	4.467.600
2.	Kopwansyah P Khataman Qur'an	40	65.829.465	65.829.465	8.413.830
3.	Kopwansyah P Saliman Bujel	27	32.707.800	53.202.600	787.600
4.	Kopwansyah l'anah Umah Campurejo	49	59.183.806.500	247.853.700	9.306.900

5.	Kopwansyah P Roudhotul Jannah	61	115.914.600	115.874.100	16.083.720
6.	Kopwansyah P Rutinan Fatayat	23	28.139.400	11.250.000	126.000
7.	Kopwansyah P Rutin Al- Hidayah	27	45.341.500	45.341.500	2.476.000
8.	Kopwansyah P Al-Hidayah	41	49.948.650	49.948.650	41.727780
9.	Kopwansyah P Malam Selasa Nur Hidayah	34	33.743.700	115.680.500	2.191.500
10.	Kopwansyah P Yasinan Al Mubarak	44	33.591.600	33.591.600	2.613.600
11.	Lantasir	64	1.187.808.927	562.656.260	39.656.260
12.	Insan Sejahtera	63	36.999.900	73.999.800	4.770.000
13.	Trijaya	49	3.608.204.821	7.130.657.165	112.731.632
14.	Harum Dhaha	387	1.381.112.871	2.762.225.742	14.553.393
15.	Ar Rahmah	477	854.571.177	1.705.452.354	61.072.801
16.	Mitra Mandiri Sejahtera	152	757.361.047	1.514.722.095	4.500
17.	Amanah Mandiri	30	807.651.147.320	709.035.594	85.172.127
18.	Berkah Abadi	20	140.963.119	278.613.889	5.810.209
19.	Amanah An Nur	199	1.565.145	3.130.300	15.235
20.	Bio Zam Zam	27	139.566.600	279.133.200	13.504.500

No.	Nama Lembaga	2017			
		Jumlah Anggota	Modal	Volume Usaha	SHU
1	Kopwansyah P Qutmil Qur'an	33	36.976.500	36.976.500	4.020.840

2.	Kopwansyah P Khataman Qur'an	36	59.246.518	59.246.518	7.572.447
3.	Kopwansyah P Saliman Bujel	24	29.437.020	47.882.340	707.940
4.	Kopwansyah l'annah Umah Campurejo	44	53.265.425.850	223.052.130	8.376.210
5.	Kopwansyah P Roudhotul Jannah	55	104.323.140	104.286.690	14.475.348
6.	Kopwansyah P Rutinan Fatayat	21	25.325.460	10.125.000	113.400
7.	Kopwansyah P Rutin Al- Hidayah	24	40.807.350	40.807.350	2.326.275
8.	Kopwansyah P Al-Hidayah	37	44.953.785	44.953.785	37.595.502
9.	Kopwansyah P Malam Selasa Nur Hidayah	30	30.369.330	105.012.450	1.972.550
10.	Kopwansyah P Yasinan Al Mubarak	39	30.232.440	30.232.440	2.352.240
11.	Lantasir	59	1.069.028.034	506.015.024	35.690.634.72
12.	Insan Sejahtera	56	56.33.299.100	66.599.820	4.293.000
13.	Trijaya	44	3.247.384.339	6.417.591.449	101.458.469
14.	Harum Dhaha	348	1.243.001.584	2.486.003.168	13.098.054
15.	Ar Rahmah	429	769.114.059	1.534.907.119	54.965.521
16.	Mitra Mandiri Sejahtera	137	681.624.942	1.363.249.885	4.050
17.	Amanah Mandiri	27	726.886.326	638.132.035	76.654.914.878
18.	Berkah Abadi	18	126.866.807	250.752.500	5.229.188
19.	Amanah An Nur	179	1.408.630	2.817.270	13.711
20.	Bio Zam Zam	24	125.609.940	251.219.880	12.154.050

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri

Dalam ekonomi Islam segala kegiatannya selalu memberikan yang terbaik bagi semua pihak yang terkait di dalamnya, semuanya tercantum didalam prinsip-prinsip dan tujuannya. Kegiatan ekonomi Islam sebenarnya menjadi salah satu kegiatan moral yang menggunakan prinsip pola syariah. Artinya segala kegiatan ekonomi bagi umat Islam harus didasarkan pada moralitas agama Islam.⁶ Lahirnya lembaga keuangan syariah sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba (bunga).⁷ Seperti penjelasan tentang haramnya riba dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ

تَقْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِن تَبُتُمْ فَلَكُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَأْتِظْلَمُونَ وَلَأْتُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok haramu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S Al-Baqarah

⁶ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 25

⁷ Ilmi Makhalu, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Medan: Patumbak UU Press, 2002), 1

278-279)⁸

Didirikannya koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis pada kerakyatan dengan landasan ekonomi yang berkeadilan serta sesuai dengan prinsi-prinsip Islam, koperasi syariah disebut sebagai lembaga yang turut membangun perekonomian kerakyatan karena pangsa pasarnya memang ditujukan bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui program pemberdayaan dan pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah.⁹

Untuk mengatasi permasalahan dalam tumbuh kembang koperasi syariah, maka koperasi syariah dibutuhkan suatu dukungan, dorongan dan peran pemerintah daerah yang mengawasi, membina, dan memajukan koperasi syariah. Dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMTK (Usaha Mikro dan Tenaga Kerja) Kota Kediri, dimana lembaga tersebut berperan dalam pengembangan koperasi-koperasi yang ada di Kota Kediri termasuk koperasi syariah, sehingga para pelaku koperasi pembiayaan syariah dapat memberi kemashlahatan bersama bagi masyarakat.

Lembaga Dinas Koperasi dan UMTK yang salah satu

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 2005), 58-59

⁹ Abdullah Syafe'i, *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam, 2012). 55

tugasnya adalah mengembangkan perkembangan pertumbuhan koperasi pembiayaan syariah, yang mana sesuai dengan penetapan peraturan walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja dalam tugas dan fungsi bagian kesatu Pasal 4, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Dinas memiliki fungsi, Perumusan kebijakan dibidang koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja; Pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja; Pelaksanaan Administrasi Kedinasan.¹⁰

Seorang manajer hendaklah mempelajari dan memahami secara keseluruhan tentang strategi pengembangan yang berkaitan dengan perkembangan manajemen yang telah memunculkan teori-teori manajemen yang dapat disesuaikan untuk menghadapi situasi tertentu. Dalam manajemen terdapat yaitu, suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber

¹⁰ Tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga kerja (Sesuai Peraturan Walikota Kediri Nomor 46 Tahun 2016)

daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹¹

Apapun bentuk organisasi itu, ia memerlukan manajemen. Suatu kelembagaan seperti instansi pemerintah atau perusahaan bahkan rumah tangga sekalipun akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik pula (teratur, rapi, benar, tertib, dan sistematis).¹² Sistem manajemen yang baik itu antara lain dapat dilihat dari bagaimana mengatur mekanisme dan hubungan kerja antara unit-unit yang ada dalam organisasi itu berjalan secara teratur, dan terkordinir, ada dalam pengawasan pimpinan, saling bersinergi membentuk kekuatan bersama untuk mencapai tujuan bersama.¹³

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, teratur dan tuntas. Apa yang diatur dalam Islam ini telah menjadi indikator pekerjaan manajemen yang merupakan bagian dari syariat Islam. Manajemen dalam Islam juga memiliki dua unsur penting yakni, subjek dan objek. Subjek merupakan pelaku atau manajer dan objek sendiri adalah tindakan manajemen yang terdiri dari organisasi, sumber daya manusia, dana, operasi atau produksi, pemasaran dan memiliki empat fungsi

¹¹ Subeki Ridhotullah dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Pustakaraya, 2015), 20-21.

¹² M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 14.

¹³ *Ibid*, 19

yaitu, perencanaan (*planning*), perngorganisasian (*organizing*), pengarahannya (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).¹⁴

Manajemen syariah merupakan seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan metode syariah. Konsep syariah yang diambil dari hukum Al-Qur'an sebagai dasar pengelolaan unsur-unsur manajemen agar dapat menggapai target yang ditujui, yang membedakan manajemen syariah dengan manajemen umum adalah konsep Illahiyah dalam implementasi yang berperan.¹⁵ Ungkapan konsep manajemen dalam Al-Qur'an antara lain disebutkan pada QS. As-Sajdah (32):5 yang berarti:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي
يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”

Firman Allah yang mengandung pengertian mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik ke langit, hal ini merupakan tamsil untuk menampakkan keagungan Allah SWT. Perihalinya sama dengan seorang raja yang mengeluarkan perintahnya kemudian perintah raja itu diterima oleh para pembantunya untuk dilaksanakan sesuai dengan instruksi raja.

¹⁴ Ibid, 2

¹⁵ Sunarji Harahap, *Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-Fungsi Manajemen*, (Sumatera Utara: FEBI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 212.

Sehingga pada konteks ini, hal tersebut dapat menjadi tamsil kepada para manajer di tingkat atas terhadap bawahannya.¹⁶ Manajemen harus memahami arah organisasi atau perusahaan yang diinginkan sebelum memulai melangkah menuju arah tersebut. Perencanaan strategi harus dapat menentukan arah organisasi dengan merumuskan tujuan yang dapat mendorong kemampuan organisasi menuju ke arah yang sukses dalam lingkungan untuk masa yang akan datang.¹⁷ Strategi menjadi suatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi, yang mempunyai peran penting untuk memberikan arah yang jelas pada semua jajaran manajemen dalam perusahaan.¹⁸

Keberadaan Koperasi Syariah di Kota Kediri memang terbilang lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan koperasi konvensional. Namun dari tahun ke tahun data jumlah anggota pun bisa bertambah, meskipun terdapat beberapa koperasi syariah di Kota Kediri. Maka diperlukan strategi yang maksimal agar koperasi syariah yang sudah berjalan tidak mengalami ketidakaktifan. Seperti beberapa strategi yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja/UMTK Kota Kediri pada pengembangan koperasi syariah di Kota Kediri dengan adanya perencanaan strategi berupa pembelajaran prinsip pola syariah

¹⁶ Ismail Nawawi, Jurnal *Manajemen Syariah : Sebuah Pemikiran, Wacana, dan Realita*, (Al-Qanun, 2010), 314.

¹⁷ Ibid, 333

¹⁸ Rahayu Puji Suci, *Esensi Manajemen Strategi*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 3

pada koperasi wanita syariah dan pelatihan bimbingan teknik, serta pelaksanaan strategi berupa kegiatan workshop atau pertemuan forum rutin pembinaan koperasi sehat dan pendampingan binaan secara langsung dalam koperasi wanita syariah. Juga pengevaluasian yang dilakukan dengan adanya Rapat Anggota Tahunan dan laporan keuangan tiap koperasi syariaiah.

Dari paparan diatas, maka permasalahan seperti beberapa koperasi syariah yang mengalami ketidakaktifan, yang pada dasarnya manajemen yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri merupakan manajemen umum sehingga manajemen syariah tersebut diterapkan sendiri oleh masing-masing koperasi syariah Kota Kediri. Oleh sebab itu maka, peneliti tertarik untuk mengambil judul : **STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI SYARIAH DI KOTA KEDIRI PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH (Studi Kasus pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri).**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Strategi dalam Pengembangan Koperasi Syariah di Kota Kediri?
2. Bagaimana Strategi dalam Pengembangan Koperasi Syariah di

Kota Kediri Perspektif Manajemen Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan strategi dalam pengembangan koperasi syariah di Kota Kediri.
2. Untuk menjelaskan strategi dalam pengembangn koperasi syariah di Kota Kediri Perspektif Manajemen Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat bagi koperasi syariah

Sebagai penambahan wawasan terkait strategi Dinas Koperasi dan UMTK dalam upaya pengembangan pertumbuhan koperasi syariah di Kota Kediri dengan selalu menerapkan manajemen syariah

2. Manfaat bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (UMTK) Kota Kediri

Sebagai masukan strategi-strategi dalam pengembangan koperasi syariah di Kota Kediri terkait manajemen berbasis

syariah

3. Manfaat bagi peneliti lain maupun pembaca

Sebagai bahan referensi maupun pertimbangan dalam pembuatan proposal atau kegiatan penelitian selanjutnya. Sebagai salah satu sarana penerapan ilmu ekonomi yang sudah didapat diperkuliahan dan untuk memperoleh pengalaman penelitian secara ilmiah dalam menganalisa dan mengidentifikasi masalah dengan tinjauan manajemen syariah dan bisa dikembangkan dengan perspektif strategi lainnya.

E. Telaah Pustaka

1. Alvin Naila Kharimata, *Implementasi Program Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kota Kediri Di Tinjau Dari Prinsip Manajemen Islam*, 2016.¹⁹

Dalam penelitian ini menjelaskan terkait implementasi program Dinas Koperasi dan UMMKM terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemberdayaan yang dilakukan sudah merata namun prosesnya bertahap ke pelaku UMKM. Program dan bentuk kegiatan yang sudah ada masih

¹⁹ Alvin Naili Kharimata, *Implementasi Program Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kota Kediri Di Tinjau Dari Prinsip Manajemen Islam*, (Kediri: IAIN Kediri, 2016).

belum bisa diikuti oleh pelaku usaha hanya sebagian yang mengikuti. Hal tersebut disebabkan kurangnya aktifnya pelaku usaha mencari informasi. Implementasi program dinas koperasi dan UMKM ditinjau dari manajemen Islam. Implementasi program sudah sesuai prinsip manajemen Islam, keadilan, amanah, dan komunikatif.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada variabel yang dibahas adalah terkait Implementasi Program Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kota Kediri Di Tinjau Dari Prinsip Manajemen Islam. Sedangkan penelitian yang sedang dijalani ini adalah Strategi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (UMTK) Kota Kediri dalam upaya Pengembangan Pembiayaan Syariah di Kota Kediri ditinjau dari Manajemen Syariah. Lebih menekankan pada strategi. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah terletak pada objek peneliti, yakni Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (UMTK) Kota Kediri.

2. Hannafik Priambodo Pratama, *Strategi Pelayanan Koperasi Syariah Harum Dhaha Kota Kediri Dalam Meningkatkan Penjualan Produk*, 2014.²⁰

²⁰ Hannafik Priambodo Pratama, *Strategi Pelayanan Koperasi Syariah Harum Dhaha*, (Kediri: IAIN Kediri, 2014).

Penelitian ini menjelaskan bahwa, Kemajuan yang diperoleh KSSU Harum Dhaha meliputi bertambahnya penjualan produk yang dimilikinya dan bertambahnya keuangan yang diperoleh KSSU berupa aset, dana pihak ketiga, dana yang tersalur dan laba. Peningkatan penjualan produk KSSU mengalami peningkatan 40% pada tahun 2012-2013, namun ada beberapa produk yang belum mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan persaingan yang ada dan kurangnya SDM pemasar yang dimiliki KSSU Harum Dhaha.

Koperasi Syariah Serba Usaha Harum Dhaha Kota Kediri menerapkan strategi pelayanan yang terarah yaitu elemen-elemen pelayanan yang harus diperhatikan diantaranya keandalan, yaitu memberikan pelayanan dan produk yang handal. Daya tanggap, memberikan pelayanan yang cepat dan selalu siap membantu nasabah. Kemudian jaminan yaitu dengan memberikan rasa nyaman kepada nasabah KSSU berupa ijin dari pihak terkait. Serta berempati atau berpihak kepada nasabah dan menjaga baik hubungan dengan nasabah dan bukti langsung atau yang terlihat, misalkan sistem komputerisasi, kebersihan, kesegaran udara menggunakan penyejuk udara/AC yang semuanya itu bertujuan untuk memanjakan nasabah.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada objek dan variabel yang dibahas adalah terkait

pelayanan koperasi syariah dalam meningkatkan penjualan produk dan objeknya ada di koperasi syariah Harum Dhaha Kota Kediri. Sedangkan penelitian yang dijalani ini objeknya adalah Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri dan lebih membahas terkait upaya Dinas Koperasi dalam pengembangan pertumbuhan koperasi syariah yang ada di Kota Kediri sehingga lebih menyeluruh. Pada persamaan kedua penelitian ini adalah terletak pada strategi.

3. Imam Suhartono, *Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis*.²¹

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi untuk mengembangkan koperasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah program unggulan yang dikembangkan sebagai ujung tombak untuk mempercepat pengembangan koperasi dilakukan melalui pengembangan kemitraan usaha serta melalui gerakan kewirausahaan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait strategi untuk pengembangan koperasi. Perbedaan dari penelitian ini adalah tentang strategi pengembangan koperasi berorientasi bisnis, sedangkan penelitian peneliti adalah terkait strategi Dinas

²¹ Imam Suhartono, *Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis*, (STIE AMA Salatiga), dalam <http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/download/32/29>, diakses pada Jum'at 26 Oktober 2018 pukul 21.04.

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (UMTK) Kota Kediri dalam Pengembangan Koperasi Syariah dari Perspektif Manajemen Syariah.

4. Saiful Bahri, *Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan dalam Pengembangan KJKS, 2011*²²

Dalam penelitian ini permasalahannya yaitu strategi, dan langkah ke depan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan dalam Pengembangan KJKS. Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan adalah dengan cara bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah maupun swasta, seperti perbankan, BUMN, serta BUMS. Strateginya adalah rencana untuk melakukan sosialisasi, mendata, pelatihan, pembinaan, serta meningkatkan kinerja para pelaku KJKS maupun UKM.

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, yakni Dinas Koperasi. Perbedaan dari penelitian ini adalah membahas terkait strategi dalam pengembangan KJKS, sedangkan peneliti ini membahas terkait strategi pengembangan koperasi syariah dalam perspektif manajemen syariah.

5. Dian Andhiny Paramasari, *Strategi Dinas Koperasi dan UKM*

²² Saiful Bahri, *Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan dalam Pengembangan KJKS*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1432/1/SAIFUL%20BAHRI-FSH.pdf>, diakses pada Jum'at 26 Oktober 2018 pukul 21.04.

*Kota Surakarta dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2009.*²³

Penelitian ini membahas terkait strategi pengembangan sektor UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini yakni, *pertama*, strategi perkuatan untuk memperkuat jalannya usaha sektor UMKM agar keberadaannya dapat selalu eksis dan bertahan di tengah perkembangan jaman yang didukung dengan kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan bagi UMKM. *Kedua*, strategi pemberdayaan merupakan strategi untuk melakukan usaha-usaha dalam rangka untuk memberdayakan keeksistensi sektor UMKM. *Ketiga*, strategi perlindungan dimaksudkan untuk melindungi jalannya usaha UMKM, agar hambatan-hambatan dalam perjalanan usahanya dapat diminimalisir.

Persamaan penelitian ini adalah pada samanya melakukan penelitian terkait strategi pengembangan di salah satu lembaga pemerintah. Sedangkan perbedaannya terletak pada strategi pengembangan penelitian ini dilakukan untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Surakarta. Jika penelitian yang sedang berjalan adalah strategi pengembangan untuk koperasi syariah

²³ Dian Andhiny Paramasari, *Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), dalam <https://eprints.uns.ac.id/4319/1/1011809092009103511.pdf>, diakses pada Jum'at, 26 Oktober 2018 pukul 21.04.

di Kota Kediri.

